

ANALISIS ALOKASI BELANJA DAERAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN WAKATOBI

Anas Sutrisno^{*1}, Arusani, La Diana³, Fatmawati

^{1,2,3,4} Program Studi Kewirausahaan, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi, Indonesia

*Korespondensi: anassutrisno@itbmwakatobi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received :

28 Juni 2022

Revised :

29 Juni 2022

Accepted :

30 Juni 2022

Online Available :

30 Juni 2022

Kata Kunci:

Alokasi Belanja Daerah,
Anggaran Pendapatan ,
Belanja Daerah

Keywords:

Regional Expenditure
Allocation,
Regional Revenue,
Expenditure

Licensed Under

a Creative Commons
Attribution 4.0

International License



Abstrak

Penelitian ini mengangkat topik tentang kinerja keuangan pemerintah daerah, alat analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dimana gambaran umumnya yaitu Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah jumlah alokasi belanja tertinggi dari tahun 2008 sampai 2012 adalah belanja modal, belanja pegawai jenis belanja tidak langsung, belanja barang dan jasa, belanja pegawai jenis belanja langsung, belanja bantuan keuangan, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Jenis belanja daerah tertinggi tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah belanja modal dengan jumlah alokasi tahun 2008 sebesar 58,38%, jumlah alokasi tahun 2009 sebesar 41,56% dengan pertumbuhan -28,81%, jumlah alokasi tahun 2010 sebesar 37,40% dengan pertumbuhan -10,02. Sedangkan tahun 2011 jenis belanja daerah tertinggi adalah belanja pegawai jenis belanja tidak langsung dengan jumlah alokasi tahun 2011 sebesar 38,69% dengan pertumbuhan 15,22%, dan jumlah alokasi tahun 2012 sebesar 41,52% dengan pertumbuhan 7,3%. Dengan demikian pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi lebih memprioritaskan belanja modal untuk keperluan kepentingan publik, karena masih banyaknya sarana dan prasarana

Abstract

This research raises the topic of local government financial performance, the analytical tool used is descriptive analysis where the general description is that With the enactment of Law Number 33 of 2004, regions are given autonomy or authority to regions to take care of their own household affairs. The existence of financial decentralization is a consequence of the authority to manage finances independently. If local governments carry out their functions effectively and have freedom in making spending decisions in the public sector, they must have the support of financial sources originating from Regional Original Revenue (PAD), Balancing Funds, Regional Loans, and others from legitimate income. The results of this study are the highest total expenditure allocations from 2008 to 2012 are capital expenditures, indirect expenditures for personnel, goods and services expenditures, personnel expenditures for direct expenditures, financial aid expenditures, grant expenditures, subsidies expenditures, aid expenditures. social and unexpected shopping. The highest type of regional expenditure in 2008 to 2012 was capital expenditure with the total allocation in 2008 of 58.38%, the total allocation in 2009 of 41.56% with a growth of -28.81%, the total allocation in 2010 of 37.40% with a growth of -10.02. Meanwhile, in 2011 the highest type of regional expenditure was personnel expenditure, indirect expenditure with a total allocation of 38.69% in 2011 with a growth of 15.22%, and a total allocation in 2012 of 41.52% with a growth of 7.3%. Thus, in 2008 to 2012, the Regional Government of Wakatobi Regency prioritized capital expenditures for the purposes of the public interest, because there were still many facilities and infrastructure.

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi. Sebelum era otonomi daerah, struktur anggaran daerah (APBD) yang berlaku adalah anggaran berimbang, dimana anggaran penerimaan atau pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau belanja. Di era otonomi daerah, struktur APBD mengacu pada pendapatan masing-masing daerah sehingga tiap-tiap daerah struktur APBD-nya akan berbeda dengan daerah lain tergantung dari kapasitas keuangan yang dimilikinya.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah.

Salah satu argumen dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. Kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya. Sebagai konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan PAD yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam mewujudkan otonomi daerah.

Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa banyak daerah tidak mampu membiayai pengeluarannya baik itu belanja langsung maupun belanja tidak langsung jika hanya mengandalkan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah daerah dengan dana perimbangan.

Kriteria yang penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur serta rumah tangganya adalah melihat posisi keuangannya. Posisi keuangan daerah dapat dilihat dari APBD, yang merupakan perencanaan keuangan daerah dan menentukan besarnya penerimaan serta pengeluaran/belanja daerah untuk membiayai semua kegiatan pembangunan dalam setiap tahun anggaran. Berikut ini akan disajikan mengenai jumlah belanja daerah Kabupaten Wakatobi dari tahun 2008 hingga 2012, sebagaimana Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Total Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi TA 2008 s/d 2012

Tahun	Total Belanja Daerah (Rp)
2008	461,490,200,663
2009	381,773,945,920
2010	360,961,916,312
2011	389,190,768,061
2012	410,467,132,612

Sumber: DPPKAD Kabupaten Wakatobi 2013 (diolah)

Berdasarkan pada Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun selama periode anggaran 2008 hingga 2012 terjadi peningkatan dan penurunan total belanja daerah kabupaten Wakatobi. Tahun 2008 total belanja daerah Kabupaten Wakatobi sebesar Rp. 461,490,200,663,-, tahun 2009 dan 2010 menurun menjadi 381,773,945,920,- dan Rp.360,961,916,312,-. Tahun 2011 total belanja daerah sebesar Rp. 389,190,768,061,- hingga tahun 2012 total belanja daerah terus meningkat menjadi Rp. 410,467,132,612,-. Hal ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi memiliki kegiatan pemerintahan,, pembangunan dan perekonomian di daerah yang meningkat pada tahun 2008 sedangkan tahun 2009 dan 2010 mengalami penurunan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Belanja daerah di Kabupaten Wakatobi sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah dan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta transfer dari pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap pengeluaran akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Sumbangan antara PAD dan dana perimbangan Terhadap belanja daerah cenderung lebih dominan dipengaruhi oleh dana perimbangan.

Kabupaten Wakatobi sebagai daerah yang baru dimekarkan pada tahun 2004 terkendala pada masalah bagaimana menutupi belanja daerah baik itu belanja langsung dan belanja tidak langsung yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sementara jumlah PAD sangat minin. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut sehingga penulis tertarik untuk memilih judul penelitian “Analisis Alokasi Belanja Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi”. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang diajukan adalah “bagaimana alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi”.

METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan metode pertumbuhan dan metode analisis proporsional alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagai berikut:

1. Metode analisis proporsional yaitu untuk menghitung besarnya proporsi alokasi masing-masing komponen belanja langsung dan belanja tidak langsung pada APBD

Kabupaten Wakatobi setiap tahun anggaran, dengan rumus:

$$P = \frac{\sum AK}{\sum AP} \times 100\%$$

Halim (2007:224)

Keterangan:

P = Proporsi alokasi masing-masing komponen belanja langsung dan belanja tidak langsung

AK = Besarnya alokasi masing-masing komponen belanja langsung dan belanja tidak langsung

AP = Besarnya alokasi anggaran belanja daerah

2. Metode analisis pertumbuhan untuk menghitung pertumbuhan alokasi masing-masing komponen belanja langsung dan belanja tidak langsung pada APBD Kabupaten Wakatobi setiap tahun anggaran, dengan rumus:

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Halim (2007:223)

Keterangan:

P_n = data pada tahun ke-n

P_o = data pada tahun sebelumnya

r = pertumbuhan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Komponen APBD terdiri dari 3 yaitu: Pendapatan daerah, Belanja daerah, Pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah Kabupaten Wakatobi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Gambaran umum tentang pendapatan daerah Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Pendapatan Daerah Kabupaten Wakatobi T.A 2008 Sampai 2012

Tahun	Pendapatan Daerah			Total Pendapatan Daerah	Pert. (%)
	PAD	Dana Perimbangan	Lain2 Pend. Yg Sah		
2008	10,899,274,154	306,780,102,832	48,699,731,305	366,379,108,291	-
2009	8,508,882,995	274,282,546,721	60,823,589,385	343,615,019,102	(6.21)
2010	12,037,648,730	266,611,915,868	73,292,233,268	351,941,797,866	2.42
2011	9,985,162,160	307,016,783,183	90,738,403,600	407,740,348,943	15.85
2012	18,195,073,103	381,654,733,773	31,971,114,153	431,820,921,029	5.91

Sumber: PPKAD Kabupaten Wakatobi 2013 (diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.1 tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Wakatobi dari tahun 2008 sampai 2012 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2008 total pendapatan daerah sebesar Rp.366.379.108.291 pada tahun 2008 menurun menjadi Rp.343.615.019.101 atau mengalami penurunan sebesar 6,21% dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan penurunan nilai PAD dan dana perimbangan sebagai komponen pendapatan daerah yang memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap nilai pendapatan daerah Kabupaten Wakatobi sedangkan lain-lain pendapatan yang sah mengalami kenaikan. Pada tahun 2010, pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 2,42% dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena penerimaan dari PAD dan lain-lain pendapatan yang sah meningkat sedangkan dana perimbangan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2011, pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 15,85% dari tahun sebelumnya hal ini karena komponen dari pendapatan yaitu dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan sedangkan komponen PAD mengalami penurunan. Tahun 2012 jumlah pendapatan daerah sebesar Rp.431.820.921.029 atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,91% dari tahun 2011, hal ini disebabkan karena penerimaan PAD dan dana perimbangan mengalami kenaikan walaupun komponen lain-lain pendapatan yang sah menurun.

Penurunan nilai penerimaan PAD pada umumnya disebabkan oleh masih rendahnya penerimaan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, masih tingginya potensi pajak dan retribusi daerah yang belum dapat teridentifikasi atau belum digali. Selain itu penurunan PAD juga disebabkan karena masih rendahnya penerimaan yang bersumber dari perusahaan daerah. Oleh karena itu diperlukan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi untuk meningkatkan penerimaan dari komponen PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Penerimaan dana perimbangan dari tahun ke tahun bervariasi dan mengalami peningkatan dan penurunan juga tergantung dari nilai bagi hasil pusat dan daerah (potensi daerah penghasil), kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal dan kegiatan daerah yang merupakan prioritas nasional. Sedangkan nilai penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang disebabkan oleh nilai penerimaan dari komponen lain-lain pendapatan yang sah berupa dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dari tahun ketahun mengalami kenaikan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Struktur belanja daerah mengacu pada Permendagri No.59 Tahun 2007 dimana belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk lebih jelasnya tentang gambaran belanja daerah Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi TA 2008 sampai 2012

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja	Pert.
2008	158,568,957,139	234,462,738,394	461,490,200,663.00	-
2009	217,134,861,827	158,655,358,124	381,773,945,920.00	(4.39)
2010	137,142,325,509	223,819,590,803	360,961,916,312.00	(3.95)
2011	174,178,394,697	215,012,373,364	389,190,768,061.00	7.82
2012	187,963,017,593	222,504,115,019	410,467,132,612.00	5.47

Sumber: PPKAD Kabupaten Wakatobi 2013 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut, menunjukkan bahwa total belanja daerah Kabupaten Wakatobi dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2009 total belanja daerah sebesar Rp.375.790.219.951 mengalami penurunan sebesar 4,39% dari tahun sebelumnya. Penurunan nilai dari belanja daerah ini disebabkan oleh penurunan pada belanja langsung. Tahun 2010 pertumbuhan belanja daerah menurun lagi yaitu sebesar 3,95% dari tahun sebelumnya, sekalipun demikian terjadi kenaikan yang signifikan pada nilai alokasi belanja langsung sedangkan belanja tidak langsung mengalami penurunan yang signifikan. Tahun 2011 total belanja daerah tumbuh sebesar 7,82% dimana terjadi kenaikan pada alokasi belanja tidak langsung dan alokasi untuk belanja langsung menurun. Dan pada tahun 2012 total belanja daerah tumbuh sebesar 5,47% dimana terjadi kenaikan pada komponen belanja tidak langsung untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan alokasi untuk belanja langsung juga mengalami kenaikan yang berarti juga alokasi belanja untuk kepentingan masyarakat/publik meningkat.

Analisis Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi

Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarnya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran Gaji dan Tunjangan) dan atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi, diperoleh bahwa belanja tidak langsung yang dikelola Pemda Kabupaten Wakatobi dari tahun 2008 sampai 2012 terdiri atas:

1. Belanja pegawai.
2. Belanja subsidi.
3. Belanja hibah.
4. Belanja bantuan sosial.
5. Belanja bantuan keuangan.
6. Belanja tidak terduga.

Untuk lebih jelasnya mengenai alokasi jenis-jenis belanja tidak langsung pada APBD Kabupaten Wakatobi ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk dalam pengertian tersebut uang dan representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai. Selain penghasilan tersebut, daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada DPPKAD Kabupaten Wakatobi, diperoleh alokasi dan pertumbuhan belanja pegawai dari tahun 2008 sampai 2012 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Alokasi dan Pertumbuhan Belanja Pegawai 2008 - 2012

Tahun	Belanja Pegawai (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Alokasi (%)	Pert.(%)
2008	80,334,346,728	461,490,200,663	17.41	0
2009	93,573,842,549	381,773,945,920	24.51	40.80
2010	121,203,325,109	360,961,916,312	33.58	37.00
2011	150,568,393,310	389,190,768,061	38.69	15.22
2012	170,444,072,979	410,467,132,612	41.52	7.33

Sumber: DPPKAD Kabupaten Wakatobi 2013 (Diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.3 tersebut, alokasi total belanja daerah terhadap belanja pegawai dari tahun 2008 sampai 2012 semakin meningkat. Tahun 2008 alokasi belanja pegawai sebesar 17,41%, kemudian menjadi 24,51% pada tahun 2009 atau tumbuh sebesar 40,80%. Hingga tahun 2012 belanja pegawai terus bertambah menjadi 41,52% atau tumbuh sebesar 7,33%. Pertumbuhan alokasi belanja pegawai ini seiring dengan bertambahnya total belanja daerah dari tahun ketahun.

Jumlah alokasi belanja pegawai ini lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah belanja-belanja lain selain belanja modal, hal ini ditujukan agar pelayanan kepada masyarakat bisa menjadi lebih baik. Belanja pegawai ini sifatnya wajib. Pertumbuhan belanja pegawai ini disebabkan oleh karena setiap tahunnya hingga tahun 2010 diadakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan kenaikan gaji setiap tahunnya. Untuk meminimalisir besarnya jumlah alokasi belanja pegawai ini maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan moratorium mulai tahun 2011 hingga tahun 2012 dengan tidak melakukan penerimaan CPNS dan perbaikan kinerja pegawai.

2. Belanja subsidi

Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh

masyarakat banyak. Perusahaan atau lembaga penerima belanja subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, dan wajib memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah. Peraturan pelaksanaan penganggaran belanja subsidi dituangkan dalam peraturan kepala daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada DPPKAD Kabupaten Wakatobi, diperoleh alokasi dan pertumbuhan belanja subsidi dari tahun 2008 sampai 2012 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Alokasi dan Pertumbuhan Belanja Subsidi 2008-2012

Tahun	Belanja Subsidi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Alokasi (%)	Pertumbuhan (%)
2008	4,100,000,000	461,490,200,663	0.89	0
2009	5,172,994,000	381,773,945,920	1.35	52.52
2010	2,650,000,000	360,961,916,312	0.73	-45.82
2011	1,560,000,000	389,190,768,061	0.40	-45.40
2012	4,974,815,114	410,467,132,612	1.21	202.37

Sumber: DPPKAD Kabupaten Wakatobi 2013 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut, alokasi total belanja daerah terhadap belanja subsidi tahun 2008 sampai 2012 mengalami penurunan dan kenaikan. Tahun 2009 alokasi belanja subsidi sebesar 0,46% atau tumbuh sebesar 52,52% dari tahun sebelumnya, tahun 2010 sampai 2011 mengalami nilai alokasi total belanja daerah terhadap belanja subsidi yaitu sebesar 0,73% atau turun sebesar 45,82%, tahun 2011 nilai alokasi belanja subsidi hanya sebesar 0,40% atau menurun sebesar 45,40%. Penurunan ini seiring dengan penurunan total belanja daerah tahun 2010 hingga tahun 2011. Sedangkan tahun 2012 nilai belanja subsidi meningkat atau sebesar 1,21% atau tumbuh sebesar 202,37%, kenaikan ini seiring dengan kenaikan total belanja daerah tahun 2012.

Belanja subsidi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan belanja pegawai. Rendahnya belanja subsidi ini disebabkan karena sedikitnya objek belanja subsidi di Kabupaten Wakatobi yang perlu disubsidi selain itu juga karena Pendapatan Asli Daerah yang masih sangat minim sehingga masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah pusat.

Belanja subsidi dianggarkan oleh Pemda Kabupaten Wakatobi untuk mensubsidi perusahaan yang merupakan kebutuhan utama masyarakat agar harganya dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat, belanja subsidi ini diberikan kepada semua PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) yang ada di Kabupaten Wakatobi.

3. Belanja hibah

Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah. Pemberian hibah

diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas, tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada DPPKAD Kabupaten Wakatobi, diperoleh alokasi dan pertumbuhan belannja hibah dari tahun 2008 sampai 2012 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Alokasi dan Pertumbuhan Belanja Hibah 2008 - 2012

Tahun	Belanja Hibah (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Alokasi (%)	Pert. (%)
2008	-	461,490,200,663	0.00	0
2009	2,068,990,000	381,773,945,920	0.54	0
2010	6,770,646,400	360,961,916,312	1.88	246.11
2011	14,404,121,887	389,190,768,061	3.70	97.31
2012	448,000,000	410,467,132,612	0.11	-97.05

Sumber: DPPKAD Kabupaten Wakatobi 2013 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut, nilai alokasi total belanja daerah terhadap belanja hibah mengalami penurunan dan kenaikan jumlah alokasi dan pertumbuhannya. Tahun 2008 Pemda Kabupaten Wakatobi tidak menganggarkan belanja hibah, tahun 2009 alokasi total belanja daerah terhadap belanja hibah sebesar 0,54%, kemudian tahun 2010 dan 2011 terus mengalami peningkatan atau sebesar 1,88% dari total belanja daerah pada tahun 2010, atau tubuh sebesar 246,11% dari tahun sebelumnya dan 97,31% pada tahun 2011. Peningkatan jumlah alokasi hingga tahun 2011 seiring dengan bertambahnya total belanja daerah. Sedangkan tahun 2012, meskipun total belanja daerah mengalami pertumbuhan, tetapi jumlah alokasi total belanja daerah tidak mengalami pertumbuhan bahkan mengalami penurunan sebesar 97,05%.

Sama halnya dengan belanja subsidi, jumlah alokasinya belanja hibah ini sangat rendah jika dibandingkan dengan belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja hibah ini sifatnya tidak wajib karena harus memperhatikan kemampuan daerah pemberi hibah. Belanja hibah bisa dilakukan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Pemberian hibah oleh Pemda Kabupaten Wakatobi umumnya diberikan dalam bentuk barang. Hibah ini diberikan kepada pemerintah kabupaten/daerah lainnya dan desa/kelurahan.

4. Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik dan pemberiannya secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non

pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Jadi belanja bantuan sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada DPPKAD Kabupaten Wakatobi, diperoleh alokasi dan pertumbuhan bantuan sosial dari tahun 2008 sampai 2012 sebagai berikut:

Tabel 4.6 Alokasi dan Pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial 2008 - 2012

Tahun	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Alokasi (%)	Pert. (%)
2008	9,083,000,000	461,490,200,663	1.97	0
2009	3,698,742,000	381,773,945,920	0.97	-50.78
2010	792,100,000	360,961,916,312	0.22	-77.35
2011	647,500,000	389,190,768,061	0.17	-24.18
2012	3,322,000,000	410,467,132,612	0.81	386.46

Sumber: DPPKAD Kabupaten Wakatobi 2013 (diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.6 tersebut, alokasi total belanja daerah terhadap belanja bantuan sosial mengalami kenaikan dan penurunan. Jumlah alokasi tahun 2009 hingga 2011 terus mengalami penurunan atau tidak mengalami pertumbuhan. Tahun 2008 alokasi belanja bantuan sosial sebesar 1,97%, tahun 2009 sebesar 0,97% menurun sebesar 50,78% hingga tahun 2011 alokasi belanja bantuan sosial sebesar 0,17% atau menurun sebesar 24,18%. Penurunan ini seiring dengan penurunan total belanja daerah. Sedangkan tahun 2012 alokasi belanja bantuan sosial bertambah sebesar 0,81% atau tumbuh sebesar 386,46%. Kenaikan ini seiring dengan kenaikan total belanja daerah.

Meskipun tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wakatobi, alokasi belanja subsidi masih lebih rendah bila dibandingkan dengan belanja hibah. Belanja bantuan sosial ini sifatnya selektif karena dana yang disalurkan akan dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah setelah programnya dinilai berhasil. Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi salah satunya diberikan kepada kelompok-kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Wakatobi.

5. Belanja bantuan keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada DPPKAD Kabupaten Wakatobi, diperoleh alokasi dan pertumbuhan belanja bantuan keuangan dari tahun 2008 sampai 2012 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Alokasi dan Pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan 2008-2012

Tahun	Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Alokasi (%)	Pert. (%)
2008	6,420,000,000	461,490,200,663	1.39	0
2009	5,350,650,000	381,773,945,920	1.40	0.75
2010	5,676,254,000	360,961,916,312	1.57	12.20
2011	6,998,379,500	389,190,768,061	1.80	14.35
2012	7,140,034,500	410,467,132,612	1.74	-3.26

Sumber: DPPKAD Kabupaten Wakatobi 2013 (diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.7 tersebut, alokasi total belanja daerah terhadap belanja bantuan keuangan dari tahun 2008 sampai 2012 adalah di bawah 2% pertahun dengan persentase alokasi belanja bantuan keuangan yang meningkat dari tahun 2009 sampai 2011 kemudian menurun pada tahun 2012. Alokasi belanja bantuan keuangan tahun 2008 sebesar 1,39% dari total belanja daerah. Tahun 2009 sampai 2011 meningkat hingga tahun 2011 dengan nilai alokasi sebesar 1,80% atau tumbuh sebesar 14,35%. Tahun 2012 jumlah alokasi belanja bantuan keuangan sebesar 1,74%. Belanja bantuan keuangan ini jumlah alokasinya masih lebih tinggi dibandingkan dengan belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan social. Bantuan keuangan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah, bantuan keuangan Pemda Kabupaten Wakatobi diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dan kelurahan.

6. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diharapkan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada DPPKAD Kabupaten Wakatobi, diperoleh alokasi dan pertumbuhan belanja tidak terduga dari tahun 2008 sampai 2012 sebagai berikut:

Tabel 4.8 Alokasi dan Pertumbuhan Belanja Tidak Terduga 2008-2012

Tahun	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Alokasi (%)	Pertumbuhan (%)
2008	1,250,000,000	461,490,200,663	0.27	0
2009	319,357,000	381,773,945,920	0.08	-69.12
2010	50,000,000	360,961,916,312	0.01	-83.44
2011	-	389,190,768,061	0.00	-100.00
2012	1,634,095,000	410,467,132,612	0.40	0

Sumber: DPPKAD Kabupaten Wakatobi 2013 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.8 tersebut, menunjukkan bahwa alokasi dan pertumbuhan alokasi belanja tidak terduga menurun dari tahun 2008 hingga tahun 2011 dan kemudian tahun 2012 belanja tidak terduga naik melebihi alokasi belanja tidak terduga tahun sebelumnya. Tahun 2008 alokasi total belanja daerah terhadap

belanja tidak terduga adalah sebesar 0,27% hingga tahun 2011 alokasi belanja tidak terduga tidak dianggarkan. Kemudian tahun 2012 alokasi belanja tidak terduga adalah sebesar 0,40%. Bila dibandingkan dengan alokasi belanja lain, alokasi belanja tidak terduga ini merupakan jenis belanja yang alokasinya sangat rendah dibanding dengan belanja-belanja lainnya karena belanja tak terduga sifatnya tidak diharapkan terulang. Peruntukan belanja tak terduga Pemda Kabupaten Wakatobi diperuntukkan untuk membantu korban bencana alam dan bencana sosial.

Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang penganggarnya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Belanja langsung mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Dianggarkan untuk setiap program atau kegiatan yang diusulkan oleh SKPD.
2. Jumlah anggaran belanja langsung suatu program atau kegiatan dapat diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan yang bersangkutan.
3. Variabilitas setiap jenis belanja langsung dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian yang diharapkan dari program atau kegiatan yang bersangkutan.

Belanja langsung terbagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa dan Belanja modal. Untuk lebih jelasnya mengenai alokasi jenis-jenis belanja langsung pada APBD Kabupaten Wakatobi ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada DPPKAD Kabupaten Wakatobi, alokasi dan pertumbuhan belanja pegawai dari tahun 2008 sampai 2012 diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.9 Alokasi dan Pertumbuhan Belanja Pegawai 2008-2012

Tahun	Belanja Pegawai (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Alokasi (%)	Pertumbuhan (%)
2008	28,940,936,840	461,490,200,663	6.27	0
2009	21,550,307,121	381,773,945,920	5.64	-9.99
2010	20,130,349,760	360,961,916,312	5.58	-1.20
2011	20,163,415,250	389,190,768,061	5.18	-7.10
2012	23,284,489,285	410,467,132,612	5.67	9.49

Sumber: DPPKAD Kabupaten Wakatobi 2013 (diolah)

Berdasarkan pada Tabel 4.9 tersebut, alokasi total belanja daerah terhadap belanja pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dari tahun 2008 sampai 2012 mengalami penurunan dan kenaikan. Tahun 2008 alokasi total belanja daerah terhadap belanja pegawai sebesar 6,27%, tahun 2009 sebesar 5,64%, turun sebesar 9,99% hingga tahun 2011 alokasi belanja pegawai menurun hingga 5,18% atau turun sebesar 7,10%. kemudian tahun 2012 jumlah alokasi belanja pegawai sebesar 5,67% atau meningkat sebesar 9,49%. Alokasi belanja pegawai jenis belanja langsung ini lebih rendah dan tidak stabil bila dibandingkan dengan alokasi belanja

pegawai jenis belanja tidak langsung karena belanja pegawai jenis belanja langsung sifatnya tidak tetap tergantung jenis, lama dan volume kegiatan berbeda dengan belanja pegawai jenis belanja tidak langsung yang sifatnya tetap.

2. Belanja barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada DPPKAD Kabupaten Wakatobi, alokasi dan pertumbuhan belanja barang dan jasa dari tahun 2008 sampai 2012 diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.10 Alokasi dan Pertumbuhan Belanja Barang dan Jasa 2008- 2012

Tahun	Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Alokasi (%)	Pert. (%)
2008	61,952,665,807	461,490,200,663	13.42	0
2009	91,383,705,126	381,773,945,920	23.94	78.31
2010	68,707,526,154	360,961,916,312	19.03	-20.48
2011	75,374,908,011	389,190,768,061	19.37	1.75
2012	82,951,559,906	410,467,132,612	20.21	4.35

Sumber: DPPKAD Kabupaten Wakatobi 2013 (diolah)

Berdasarkan pada Tabel 4.10 tersebut, alokasi total belanja daerah terhadap belanja barang dan jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dari tahun 2008 sampai 2013 menunjukkan ketidakstabilan atau mengalami kenaikan dan penurunan jumlah alokasi maupun pertumbuhannya. Tahun 2009 alokasi belanja barang dan jasa sebesar 23,94% atau mengalami kenaikan sebesar 78,31%, kemudian tahun 2010 jumlah alokasi belanja barang dan jasa sebesar 19,03% atau menurun sebesar 20,48%. Tahun 2011 dan 2012 alokasi belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar 1,75% tahun 2011 dan 4,35% pada tahun 2012. Alokasi belanja barang dan jasa merupakan jenis belanja yang jumlahnya lebih besar setelah belanja pegawai (belanja tidak langsung) dan belanja modal dibandingkan dengan alokasi belanja-belanja lainnya.

Belanja barang dan jasa Pemda Kabupaten Wakatobi digunakan untuk membiayai belanja pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah /gedung /gudang, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis.

3. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai asset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset

tersebut siap digunakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada DPPKAD Kabupaten Wakatobi, alokasi dan pertumbuhan belanja modal dari tahun 2008 sampai 2012 diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.11 Alokasi dan Pertumbuhan Belanja Modal 2008 - 2012

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Alokasi (%)	Pert. (%)
2008	269,409,251,288	461,490,200,663	58.38	0
2009	158,655,358,124	381,773,945,920	41.56	-28.81
2010	134,981,714,889	360,961,916,312	37.40	-10.02
2011	119,474,050,103	389,190,768,061	30.70	-17.91
2012	116,268,065,828	410,467,132,612	28.33	-7.73

Sumber: DPPKAD Kabupaten Wakatobi 2013 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.11 tersebut, alokasi total belanja daerah terhadap belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dari tahun 2008 sampai 2012 mengalami penurunan yang tidak sebanding dengan kenaikan total belanja daerah. Tahun 2008 alokasi belanja modal sebesar 58,38%, tahun 2009 alokasi belanja modal sebesar 41,56% atau turun sebesar 28,81%, tahun 2010 belanja modal 37,40% atau turun sebesar 10,02%. Penurunan ini seiring dengan menurunnya total belanja daerah dari tahun 2009 sampai 2010. Tahun 2011 dan 2012 meskipun total belanja daerah mengalami kenaikan tetapi alokasi total belanja daerah terhadap belanja modal justru hanya sebesar 30,70% atau menurun sebesar 17,91% pada tahun 2011, 28,33% atau menurun sebesar 7,73% pada tahun 2012.

Tingginya alokasi belanja modal dibandingkan dengan alokasi belanja lain disebabkan karena masih banyaknya sarana dan prasarana berupa bangunan, jalan, jembatan dan lain-lain yang menjadi objek belanja modal yang sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan kegiatan lain masyarakat Kabupaten Wakatobi. Alokasi belanja modal merupakan jenis belanja yang alokasinya paling tinggi dibanding dengan belanja yang lain. Hal ini berarti bahwa Pemda Kabupaten Wakatobi lebih memprioritaskan belanja untuk kepentingan pelayanan public dibandingkan dengan belanja yang lain.

Untuk mewujudkan belanja daerah yang ekonomis, efisien dan efektif maka Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi maka pemerintah harus diperhatikan hal-hal berikut:

1. Dalam mengalokasikan anggaran untuk keperluan belanja harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip pengeluaran/belanja berikut:
 - a. Perencanaan belanja. Perencanaan belanja harus terencana dengan baik. Anggaran yang direncanakan dengan baik akan memudahkan tahap implementasi dan memungkinkan tercapainya target yang efektif.
 - b. Pengendalian belanja daerah. system anggaran harus memungkinkan dilakukannya pengendalian belanja secara memadai. Untuk itu pada setiap siklus pengeluaran harus harus dikendalikan dan dimonitor dengan baik. Setiap harus dapat dilacak prosesnya mulai dari adanya kelengkapan dokumen anggaran, otorisasi dari pejabat berwenang dan adanya bukti transaksi yang valid.

- c. Akuntabilitas belanja. Belanja daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik, yaitu setiap belanja harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada public secara langsung maupun secara tidak langsung melalui DPRD.
- d. Auditabilitas belanja daerah. auditabilitas belanja daerah mengandung arti bahwa setiap pengeluaran belanja harus dapat diaudit dan diverifikasi.
2. Alokasi anggaran yang sesuai dengan kebijakan dan prioritas anggaran (alokasi strategis).
3. Menjamin efisiensi dan efektifitas alokasi belanja daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah alokasi belanja tertinggi dari tahun 2008 sampai 2012 adalah belanja modal, belanja pegawai jenis belanja tidak langsung, belanja barang dan jasa, belanja pegawai jenis belanja langsung, belanja bantuan keuangan, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Jenis belanja daerah tertinggi tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah belanja modal dengan jumlah alokasi tahun 2008 sebesar 58,38%, jumlah alokasi tahun 2009 sebesar 41,56% dengan pertumbuhan -28,81%, jumlah alokasi tahun 2010 sebesar 37,40% dengan pertumbuhan -10,02. Sedangkan tahun 2011 jenis belanja daerah tertinggi adalah belanja pegawai jenis belanja tidak langsung dengan jumlah alokasi tahun 2011 sebesar 38,69% dengan pertumbuhan 15,22%, dan jumlah alokasi tahun 2012 sebesar 41,52% dengan pertumbuhan 7,3%. Dengan demikian pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi lebih memprioritaskan belanja modal untuk keperluan kepentingan publik, karena masih banyaknya sarana dan prasarana

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN ANGGARAN DAERAH. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Darise, Nurlan. 2009. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: PEDOMAN UNTUK EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF RANGKUMAN 7 UNDANG-UNDANG, 30 PERATURAN PEMERINTAH DAN 15 PERMENDAGRI. Indeks. Jakarta
- Halim, Abdul. 2007. AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Salemba Empat. Jakarta.
- Harlina B. 2012. ANALISIS POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI. Tesis. Universitas Haluoleo. Kendari.
- Mahmudi. 2010. MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH. Erlangga. Jakarta.
- Nazir, Muhammad. 1999. METODE PENELITIAN. Ghalia. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PEMERINTAHAN DAERAH.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KEUANGAN NEGARA.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 tahun 2002 Tentang PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PEMERINTAHAN DAERAH.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 tahun 2007 Tentang PETUNJUK TEKNIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
- Sarita, Beta. 2004. PERANAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BOGOR. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang
- Soleh, Chobib dan Rochmansjah, Heru. 2010. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEBUAH PENDEKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK. Fokus Media. Bandung.